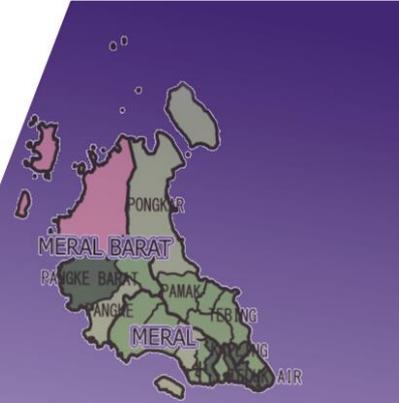




**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

**NATIONAL
FOOD
AGENCY**



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

FSVA

Food Security and
Vulnerability Atlas

**KABUPATEN KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



FSVA KARIMUN 2023



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

**NATIONAL
FOOD
AGENCY**



FSVA KARIMUN 2023

Food Security and Vulnerability Atlas Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Editor :

D. Wahyuni Nurilahi, SH
Zulkarnaini, SP

Layout :

Sukrianto Jaya Putra, S.P.,M.M
D. Wahyuni Nurilahi, SH

Cover :

Danang WD

Penerbit:

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun

Alamat:

Gedung Bukit Salembak Lt. 1. Kompleks Kantor Dinas
Jln Jend. Sudirman - Poros Tanjung Balai Karimun
Kabupaten Karimun

KONTRIBUTOR

Tim Penyusun

1. **Sukrianto Jaya Putra, SP.MM**
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Karimun
2. **D. Wahyuni Nurilahi, SH**
Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pangan dan
Pertanian Kab. Karimun
3. **Zulkarnaini, SP**
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Pangan dan
Pertanian Kab. Karimun
4. **Ambarwati Purwaningrum, S.P**
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Pangan dan
Pertanian Kab. Karimun
5. **Septi Dayana**
Staf Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pangan dan
Pertanian Kab. Karimun

KONTRIBUTOR

Tim Pengumpul Data

Ir. Raja Jamain, MAP

Kabid Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun

Muhammad Amin

Pekerja Sosial Ahli Muda
Dinas Sosial Kabupaten Karimun

Herna, S.Sos

Analisis Perdagangan Ahli Muda,
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Karimun

Aditia Aris, AMK

Pengelola Bahan Perencanaan
Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun

Chairudin Husin Kiang, A.Md

Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi
Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun

Aviv Widiyanto, S.IP

Perencana Ahli Muda
Bapperlitbang Kabupaten Karimun

Didit Kurniawan, A.Md

Statistik Pelaksana Lanjutan
BPS Kabupaten Karimun

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) Tahun 2023 telah rampung dikerjakan. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Peta tersebut menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pemangku amanat publik dalam merencanakan dan mengimplementasikan program pembangunan yang berorientasi pada penyelesaian secara terpadu.

Melalui kesempatan pertama, kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah turut membantu memberikan kontribusi dalam penyelesaian penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) Tahun 2023 ini. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) tahun-tahun selanjutnya

Tanjung Balai Karimun, Desember 2023

Kepala Dinas Pangan dan pertanian
Kabupaten Karimun

SUKRIANTO JAYA PUTRA, S.P., M.M

Pembina TK.I

NIP.19730120 200012 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk; dan (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; dan (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; dan (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk..
5. Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok prioritas dilihat dari sisi kerentanan terhadap kerawanan pangan. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan rawan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat

rentan rawan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan rawan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan rawan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan rawan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

6. Hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) Tahun 2023 menunjukkan bahwa desa/kelurahan rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 5 desa dari 71 desa (7,04%) yang keseluruhannya berada pada Prioritas 3. Desa prioritas 3 tersebut adalah Desa Sugie, Desa Keban, Desa Pulau Moro, Desa Tanjung Pelanduk, dan Desa Buluh Patah yang keseluruhannya berada di Kecamatan Moro.
7. Karakteristik desa rentan pangan ditandai dengan desa yang memiliki geografis kepulauan (satu desa terdiri dari satu atau beberapa pulau), sehingga akses terhadap tenaga kesehatan, air bersih dan sarana prasarana pangan cukup kurang dan tidak merata.
8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan:
 - a. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan sumber air baku, fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan tentang air bersih dan hidup sehat;
 - b. Penyediaan dan pemerataan tenaga kesehatan; dan
 - c. Pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih, rumah sakit), dan Penyediaan sarana ekonomi, terutama penyedia sarana pangan serta pembangunan usaha produktif / UMKM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi.....	4
1.3. Metodologi	8
BAB 2 KETERSEDIAAN PANGAN	14
2.1. Lahan Pertanian.....	14
2.2. Sarana dan Prasarana Ekonomi	22
2.3. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan.....	23
BAB 3 AKSES PANGAN	29
3.1. Penduduk Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah	29
3.2. Akses Transportasi.	31
3.3. Strategi Peningkatan Akses Pangan	33
BAB 4 PEMANFAATAN PANGAN	38
4.1. Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih	38
4.2. Rasio Tenaga Kesehatan.....	41
4.3. Dampak (Outcome) Dari Status Kesehatan.....	43
4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan.....	47
BAB 5 KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT	57
5.1. Kondisi Ketahanan Pangan.....	57
5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan	59
BAB 6 REKOMENDASI KEBIJAKAN	61

DAFTAR TABEL

1.1. Tabel Indikator FSVA Kabupaten 2023.....	9
1.2. Tabel Bobot Indikator Individu	11
2.1. Tabel sebaran rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk Berdasarkan Prioritas	15
2.2. Tabel desa prioritas 1 – 3 indikator rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	16
2.3. Tabel Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian 2018-2022	17
2.4. Tabel Produksi Padi Tahun 2018-2022.....	18
2.5. Tabel Produksi Jagung Tahun 2018-2022	19
2.6. Tabel Produksi Ubi Kayu Tahun 2018-2022	20
2.7. Tabel Produksi Ubi Jalar Tahun 2018-2022.....	21
2.8. Tabel sebaran rasio sarana prasarana penyedia pangan	22
2.9. Tabel desa prioritas 1 – 3 indikator rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	23
3.1. Tabel Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karimun (2018 – 2022)	30
3.2. Tabel Sebaran Rasio Penduduk dengan tingkat Kesejahteraan Terendah	30
3.3. Tabel desa prioritas 1 – 3 indikator rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah	31
4.1. Tabel Sebaran Desa Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Prioritas	39
4.2. Tabel desa prioritas 1 – 3 indikator rasio rumah tangga tanpa akses air bersih.....	40
4.3. Tabel Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan di Desa Berdasarkan Skala Prioritas	41
4.4. Tabel desa prioritas 1 – 3 indikator rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk	42
4.5. Tabel Jumlah Balita Stunting Tahun 2020 – 2022	44
4.6. Tabel Penderita Gizi Buruk 2018 – 2022	45
4.7. Tabel Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan Per Kecamatan Tahun 2022	47
5.1. Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Prioritas.....	58

DAFTAR GRAFIK

2.1.	Grafik Jumlah Desa Berdasarkan Prioritas	15
2.2.	Grafik Produksi sereal/pokok dan umbi-umbian 2018-2022	17
2.3.	Grafik Sebaran Rasio Sarana Prasarana ekonomi Berdasarkan Prioritas	23
3.1.	Grafik Persentase Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Prioritas	31
4.1.	Grafik Persentase Rasio prioritas 1-3 dengan prioritas 4-6 untuk tenaga kesehatan	42
4.2.	Grafik Penderita Gizi Buruk Tahun 2018 – 2022	44

DAFTAR GAMBAR

1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi.....	6
2.1. Peta Luas Lahan Pertanian	27
2.2. Peta Sarana Prasarana Penyedia Pangan.....	28
3.1. Peta Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah	36
3.2. Peta Akses Tranportasi.....	37
4.1. Peta Rumah Tangga tanpa Akses Air Bersih	55
4.2. Peta Sebaran Tenaga Kesehatan	56
5.1. Sebaran Piritas Komposit Per Kecamatan	59
5.2. Peta Komposit FSVA 2023.....	60
6.1. Kerangka Intervensi Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Karimun terdiri dari 14 kecamatan, 42 desa dan 29 Kelurahan dengan total penduduk tahun 2022 sebesar 260.620 jiwa (Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Karimun). Kabupaten Karimun terdiri dari 250 pulau dan 57 di antaranya berpenghuni (BPS, 2020). Secara keseluruhan total luas daratan dan perairan Kabupaten Karimun kurang lebih 9.984 km² dengan persentase luas darat dan laut masing-masing 19,09 persen dan 80,91 persen. Kabupaten Karimun terletak pada koordinat 00⁰35' LU sampai 01⁰10' LU dan 103⁰30' BT sampai 104⁰ BT dengan wilayah laut yang berada dalam batas wilayah empat mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang- Undang Nomor 5 tahun 1983.

Kabupaten Karimun termasuk ke dalam wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Letaknya berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura, serta hanya disatukan dengan perairan Selat Singapura (Phillip channel). Selain itu, wilayah administrasi Kabupaten Karimun berbatasan dengan Kota Batam, sebagian Kepulauan Riau dan sebagian wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan aspek geostrategisnya, maka Kabupaten Karimun menjadi salah satu dari empat kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau Free Trade Zone/FTZ). Tiga kawasan KPBPB lainnya adalah Sabang, Bintan, dan Batam. Batas-batas Kabupaten Karimun, yaitu:

- Utara : Selat Singapura (Philip Channel), Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia.
- Selatan : Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hilir) dan Kabupaten Lingga.
- Barat : Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi (Kabupaten Kepulauan Meranti) dan Kecamatan Kuala Kampar (Kabupaten Pelalawan).
- Timur : Kecamatan Belakang Padang (Kota Batam).

Secara klimatologis, Kabupaten Karimun memiliki pola tipe curah hujan tipe iklim basah, yaitu daerah basah memiliki curah hujan lebih dari 2.000 mm per tahun dan daerah kering memiliki curah hujan kurang dari 2.000 mm per tahun hal ini karena sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin yang melintas. Berdasarkan arahnya, angin berasal dari arah Utara, Timur Laut, Barat Laut, Tenggara, Selatan, dan sebelah Barat Laut Kabupaten Karimun. Pada puncak musim penghujan, yaitu bulan Desember dan Januari, kecepatan rata-rata angin di Kabupaten Karimun mencapai titik maksimum sampai lima knot per-hari. Layaknya kabupaten lain di Indonesia yang termasuk ke dalam daerah tropis, Kabupaten Karimun hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau di Kabupaten Karimun ditandai dengan jumlah curah hujan yang rendah. Berdasarkan data dari stasiun BMG Tanjung Balai Karimun, rata-rata curah hujan tahun 2022 di Kabupaten Karimun sebesar 250 mm³, dimana curah hujan terendah terjadi di bulan Januari, yaitu sebesar 34,6 mm³ dan tertinggi terjadi di bulan Agustus, yaitu sebesar 523,4 mm³. Jumlah hari hujan terbanyak selama 24 hari terjadi di bulan Oktober 2022.

Pada tahun 2022 sektor-sektor yang menjadi andalan dalam perekonomian Kabupaten Karimun adalah sektor konstruksi sebesar 19,94 persen, perdagangan sebesar 18,32 persen, pertanian sebesar 14,70 persen, industri pengolahan sebesar 12,18 persen, pertambangan dan penggilingan sebesar 11,88 persen.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 95 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2020. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2021, 2022 dan tahun 2023.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan

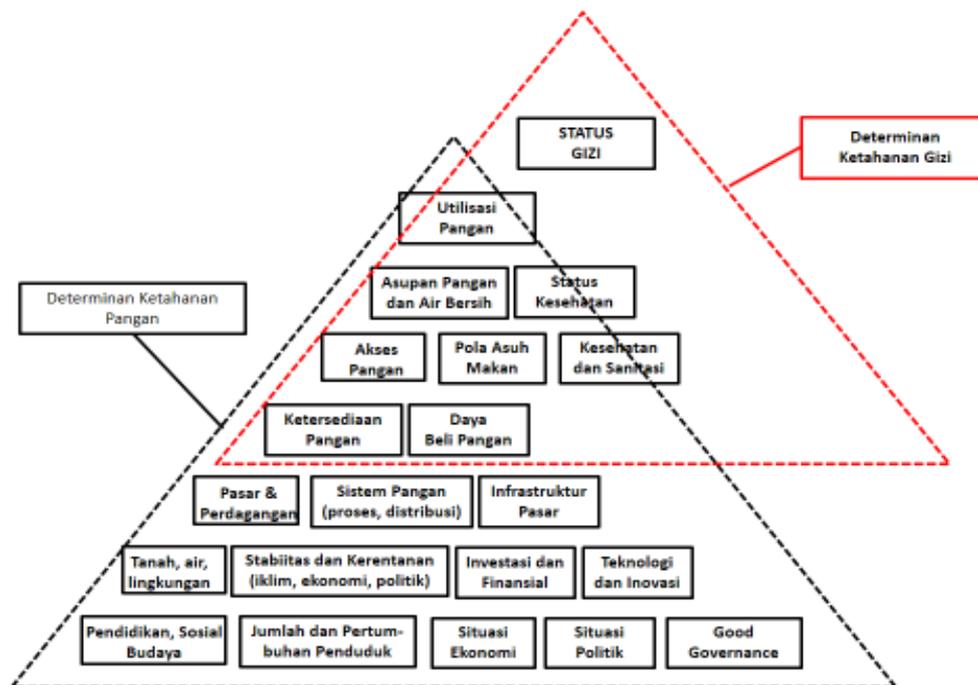
penyelenggaraan pangan. Pada pasal 9, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1999. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO¹ mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013² juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.

¹ Disampaikan pada Committee on World Food Security, 37th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

² Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi
(Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai ketahanan pangan dan gizi seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih

mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3. Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel 1.1. Indikator FSVA Kabupaten 2023

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	Luas lahan pertanian dibandingkan dengan jumlah penduduk	Data Luas Wilayah Desa, Pusat Data Informasi Kementan 2022; Data Luas Lahan Pertanian 2022, Dinas Pertanian Kabupaten; Disduk Capil Kabupaten;
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Data Toko dan Warung Penyedia Pangan 2022, Dinas Perdagangan Kabupaten; Potensi Desa 2022, BPS Kabupaten; Data Jumlah Kepala Keluarga 2022, Disduk Capil Kabupaten;
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil I) dibandingkan jumlah penduduk desa	Data P3KE 2022, Dinsos Kabupaten; Data Jumlah Penduduk 2022, Disduk Capil Kabupaten.
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	Data Sarana Jalan 2022, Dishub Kabupaten; Potensi Desa 2022, BPS
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	Jumlah rumah tangga desil I s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Data Rumah tangga tidak memiliki akses air bersih terlindungi 2022, Dinkes Kabupaten, Data Kepala Keluarga 2022, Disduk Capil Kabupaten

Indikator	Definisi	Sumber Data
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk desa	Data Jumlah tenaga kesehatan 2022, Dinkes Kabupaten; Data Jumlah Penduduk 2022, Disduk Capil Kabupaten

Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.



Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots\dots\dots (1)$$

Dimana:

- Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j
- a_i : Bobot masing-masing indikator
- X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot	
		Kabupaten	Kota
1.	Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	1/6	-
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	1/6	1/3
Sub Total		1/3	1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	1/6	1/6
Sub Total		1/3	1/3

5.	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6	1/6
6.	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6	1/6
Sub Total		1/3	1/3

- c. Mengelompokkan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 a_i C_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

K_j : *cut off point* komposit ke-J

a_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-l kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

BAB 2

KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

2.1. LAHAN PERTANIAN

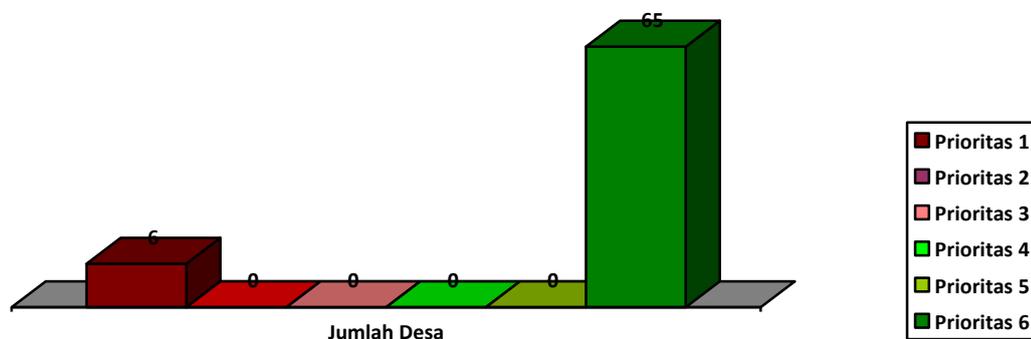
Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara luas lahan pertanian dengan jumlah penduduk di wilayah desa tersebut. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan pertanian memiliki

korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan¹. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dari 71 desa di Kabupaten Karimun, 6 desa masuk dalam prioritas 1 (7,04 %) yaitu Kel. Tanjung Balai, Kel. Teluk Air, Kel. Tg Balai Kota, Kel. Sungai Lakam Barat dan Kel. Meral Kota, dan tidak ada desa prioritas 2 dan desa prioritas 3. Kecamatan yang memiliki rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk prioritas 1-3 sebagian besar tersebar di Kecamatan Karimun yaitu sebanyak 4 desa.

Tabel 2.1 Tabel Sebaran rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk berdasarkan prioritas

Prioritas	Range Rasio Lahan Pertanian	Jumlah Desa	Persentase
Prioritas 1	< 0,000000004256	6	8,45
Prioritas 2	0,000000004256 - 0,000000006537	0	0
Prioritas 3	0,000000006537 - 0,000000011071	0	0
Prioritas 4	0,000000011071 - 0,000000018537	0	0
Prioritas 5	0,000000018537 - 0,000000069038	0	0
Prioritas 6	> 0,000000069038	65	91,55



Grafik 2.1. Grafik Jumlah Desa berdasarkan prioritas

¹ Yudhistira (2013) Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Fakultas Ekonomi dan

Apabila dilihat dari desa yang tidak memiliki lahan pertanian tersebut terlihat bahwa kecuali Desa Ngal, kesemuanya berada pada wilayah padat penduduk, sehingga tidak tersedia lagi lahan pertanian yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam.

Tabel 2.2 Tabel desa prioritas 1 – 3 indikator rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
		Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3
1	UNGGAR	Kel. Ngal		
2	KARIMUN	Kel. Tanjung Balai Kel. Teluk Air Kel. Tanjung Balai Kota Kel. Sungal lakam Barat		
3	MERAL	Kel. Meral Kota		

Pemerintah Kabupaten Karimun telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 14,70 % dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karimun pada tahun 2022 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi.

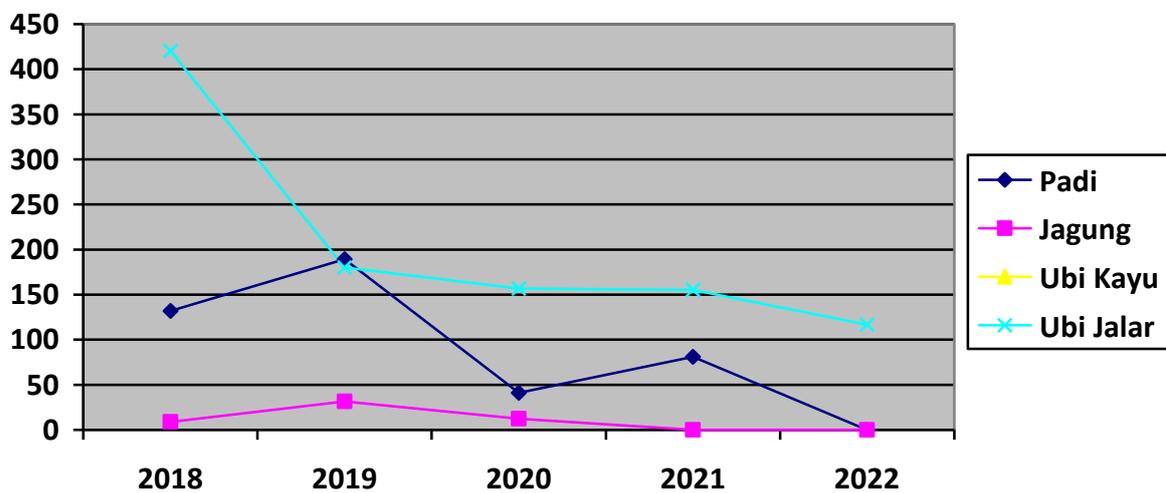
Berdasarkan Tabel 2.3 dan Grafik 2.2, diketahui bahwa tahun 2018, total produksi sereal dan umbi-umbian mencapai 3.073 ton dan terus menunjukkan penurunan sampai tahun 2021. dan pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2021 dan 2022 total produksi sereal hanya pada kisaran 1.500 sampai dengan 1.700 ton.

Dari total produksi sereal dan umbi-umbian periode 2018 -2022 sebagian besar didominasi oleh produksi ubi kayu, dimana pada periode tahun 2018 - 2022 mencapai 85% dari total produksi sereal dan umbi-umbian di Kabupaten Karimun.

Tabel 2.3 Tabel Produksi Sereal Pokok dan Umbi-umbian 2018-2023 (Ton)

Sereal	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata 5 tahun
Padi	132	189,27	40,94	80,94	0	88.63
Jagung	8,82	31,63	12,47	0	0	10.58
Ubi Kayu	2.512,8	1.908,3	1.467,25	1.293,44	1.870,13	1.810.38
Ubi Jalar	420,3	179,9	156,68	155,28	116,28	205.69

Sumber: BPS Kabupaten Karimun, 2023



Grafik 2.2 Grafik Produksi Sereal Pokok dan Umbi-umbian 2018-2022 (Ton)

Padi

Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Karimun selama 5 tahun terakhir (2018-2022) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 2.3. Produksi padi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai 189,27 ton dimana di sumbang oleh kecamatan Kundur Utara sebesar 123 ton dan Kecamatan Kundur Barat sebesar 66 Ton. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan bahkan pada tahun 2022 produksi padi menjadi 0 ton (tidak berproduksi).

Namun demikian bila dilihat dari kebutuhan beras masyarakat Kabupaten Karimun tahun 2022 yang mencapai 30.415 ton, maka produksi padi di Kabupaten Karimun tergolong sangat kecil.

Tabel 2.4 Tabel Produksi Padi 2018 – 2022 (Ton)

NO	KECAMATAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	MORO
2	DURAI
3	KUNDUR
4	KUNDUR UTARA	...	123,23
5	KUNDUR BARAT	...	66,04
6	LINGAR
7	BELAT
8	KARIMUN
9	BURU
10	MERAL
11	TEBING
12	MERAL BARAT
TOTAL		132	189,27	40,94	80,94	0

Sumber: BPS Kabupaten Karimun, 2023

Jagung

Pada rentang tahun 2018 - 2022, produksi jagung rata-rata sebesar 10 ton per tahun. Hal ini terjadi karena selama dua tahun terakhir yaitu tahun 2021 dan 2022 tidak tercatat adanya produksi jagung di Kabupaten Karimun. Produksi jagung tertinggi diperoleh pada tahun 2019 sebesar 31,64 ton yang disumbang oleh Kecamatan Kundur Utara, Kundur Barat dan Moro. Secara rinci produksi jagung tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Tabel Produksi Jagung 2018 – 2022 (Ton)

NO	KECAMATAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	MORO	...	1,25	0,00
2	DURAI	...	0,00	0,00
3	KUNDUR	...	0,00	1,63
4	KUNDUR UTARA	...	5,05	7,69
5	KUNDUR BARAT	...	2,52	9,76
6	UNGAR	...	0,00	0,00
7	BELAT	...	0,00	0,00
8	KARIMUN	...	0,00	0,00
9	BURU	...	0,00	12,55
10	MERAL	...	0,00	0,00
11	TEBING	...	0,00	0,00
12	MERAL BARAT	...	0,00	0,00
TOTAL		8,82	31,64	12,47	0	0

Sumber: BPS Kabupaten Karimun, 2023

Menurut analisis Neraca Pangan, kebutuhan jagung di Kabupaten Karimun mencapai 207 ton. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan jagung di Kabupaten Karimun harus dengan mendatangkannya dari luar Kabupaten Karimun.

Ubi Kayu

Produksi ubi kayu terus mengalami penurunan, dengan total produksi 2.512,8 pada tahun 2018, Produksi ubi kayu tinggal hanya sebesar 1.293,25 ton pada tahun 2021. Namun terjadi peningkatan produksi pada tahun 2022 menjadi 1.870,13 ton. Rincian produksi ubi kayu tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Tabel Produksi Ubi Kayu 2018 - 2022 (Ton)

NO	KECAMATAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	MORO	144,2	142,4	96,93	71,38	...
2	DURAI	62,6	-	-	7,67	...
3	KUNDUR	596,0	319,6	112,45	212,61	...
4	KUNDUR UTARA	135,6	169,4	109,18	156,85	...
5	KUNDUR BARAT	578,1	485,5	145,66	273,41	...
6	UNGAR	15,6	-	13,96	13,27	...
7	BELAT	95,7	30,6	60,46	0,00	...
8	KARIMUN	-	36,6	100,70	41,11	...
9	BURU	45,2	137,8	145,46	243,21	...
10	MERAL	69,7	75,6	88,91	104,81	...
11	TEBING	254,4	214,5	198,39	0,00	...
12	MERAL BARAT	515,8	296,3	395,14	169,11	...
TOTAL		2.512,8	1.980,3	1.467,25	1.293,44	1.870,13

Sumber: BPS Kabupaten Karimun, 2023

Produksi ubi kayu yang mencapai rata-rata sebesar 1.810 ton telah mampu mendorong konsumsi umbi-umbian dan memberikan sekitar 88% energi dari kelompok umbi-umbian masyarakat Kabupaten Karimun.

Ubi Jalar

Produksi ubi jalar di Kabupaten Karimun selama kurun waktu 5 tahun (2018 - 2022) sangat fluktuatif. Produksi terbesar terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 420 ton. Kecamatan Kundur merupakan penyumbang terbesar, yaitu sebesar 180

ton, Kecamatan Kundur Barat sebesar 107 ton, Kecamatan Meral Barat sebesar 73,5 ton. Walaupun terjadi peningkatan pada sentra produksi (Kecamatan Kundur, Kundur Utara dan Meral Barat) dibanding pada tahun 2020, Pada Tahun 2021, Kecamatan Meral Barat tidak mencatatkan produksi sama sekali. Rincian produksi ubi jalar tahun 2018 - 2022 disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Tabel Produksi Ubi Jalar 2018 - 2022 (Ton)

NO	KECAMATAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	MORO	5,11	-	-	0,00	...
2	DURAI	-	-	-	0,00	...
3	KUNDUR	180,27	73,25	48,06	63,70	...
4	KUNDUR UTARA	106,96	32,56	23,55	43,69	...
5	KUNDUR BARAT	22,95	11,22	12,17	32,47	...
6	UNGAR	2,70	3,09	1,56	3,33	...
7	BELAT	19,73	12,93	12,74	1,05	...
8	KARIMUN	-	-	3,10	0,00	...
9	BURU	-	-	-	0,00	...
10	MERAL	-	20,33	9,57	0,00	...
11	TEBING	9,10	6,96	25,05	11,05	...
12	MERAL BARAT	73,50	19,57	20,88	0,00	...
TOTAL		420,33	179,91	156,68	155,28	116,58

Sumber: BPS Kabupaten Karimun, 2023

Apabila dilihat dari kebutuhan masyarakat kabupaten karimun akan ubi jalar sekitar 373 ton pada tahun 2022, maka Produksi ubi jalar yang mencapai rata-rata sebesar 206 ton pertahun ini perlu peningkatan produksi yang signifikan.

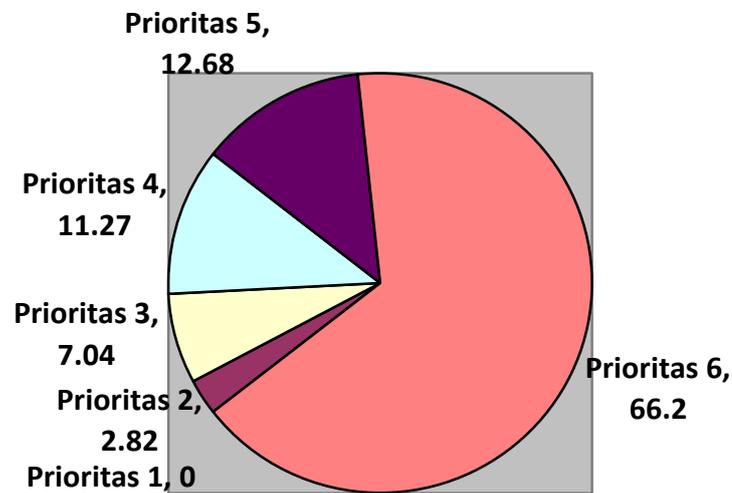
2.2. SARANA DAN PRASARANA EKONOMI

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

Dari 71 desa/kelurahan di Kabupaten Karimun, 2 desa masuk dalam prioritas 1 (2,82%), 10 desa masuk dalam prioritas 2 (14,08%) dan 20 desa prioritas 3 (28,17%).

Tabel 2.8. Tabel Sebaran rasio sarana prasarana pangan

Prioritas	Range Rasio Sarana Pangan	Jumlah Desa	Persentase (%)
Prioritas 1	< 0,0155	0	0
Prioritas 2	0,0155 - 0,0226	2	2.82
Prioritas 3	0,0226 - 0,0313	5	7.04
Prioritas 4	0,0313 - 0,0385	8	11.27
Prioritas 5	0,0385 - 0,0492	9	12.68
Prioritas 6	> 0,0492	47	66.20



Grafik 2.3. Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

Tabel 2.9 Tabel desa prioritas 1 – 3 indikator rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
		Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3
1	MORO		Kel. Moro Desat Selat Mie	Desa Sugie Tanjung Pelanduk Desa Pulau Moro
2	KARIMUN			Desa Parit Desa Tulang

2.3. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Dengan jumlah penduduk mencapai 260,620 jiwa pada tahun 2022, Kabupaten Karimun setidaknya membutuhkan beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat mencapai lebih dari 30.000 ton setiap tahunnya, sementara produksi padi 0 ton pada tahun 2022. Namun demikian produksi ubi kayu dan ubi jalar menyumbang hampir seluruh kebutuhan masyarakat.

Dengan kondisi tersebut, maka ketersediaan pangan perlu diupayakan melalui impor yaitu memasukkan bahan pangan ke Kabupaten Karimun. Dengan demikian ketersediaan sarana ekonomi penyedia pangan sangat penting. Dengan melihat ketersediaan sarana ekonomi penyedia pangan pada prioritas 1-3 mencapai 9,86%. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

Kebijakan kabupaten Karimun mengenai ketersediaan pangan pada periode 2018 - 2022 bertujuan untuk (i) peningkatan penerapan teknologi pertanian (ii) peningkatan produksi pertanian; (iii) pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan (iv) mengurangi dampak iklim-terkait resiko. Strategi untuk masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

- (i) Peningkatan penerapan teknologi pertanian
 - a. Pengembangan teknologi pertanian
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna
 - c. Penyuluhan penerapan teknologi pertanian
- (ii) Peningkatan produksi pertanian
 - a. Pengembangan bibit unggul pertanian
 - b. Optimasi tanaman pangan
 - c. Pembangunan dan rehabilitasi jalan usaha tani
 - d. Pembangunan jalan produksi pertanian
 - e. Potensi pengembangan kawasan pertanian
 - f. Pembangunan embung
 - g. Pengembangan tanaman pangan
 - h. Memperkuat pengawasan, koordinasi dan supervisi untuk peningkatan produktivitas pertanian
- (iii) Pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan
 - a. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
 - b. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian
 - c. Operasional penyuluh pertanian
 - d. Kredit dan energi untuk ketahanan pangan
 - e. Lembaga Mandiri dan Mengakar pada Masyarakat

- f. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
- g. Pemasaran produk pertanian, misal TTI, dll
- (iv) Pengurangan dampak iklim terkait resiko
 - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
 - b. Mengurangi kehilangan hasil (susut) pada saat panen dan pengolahan hasil panen

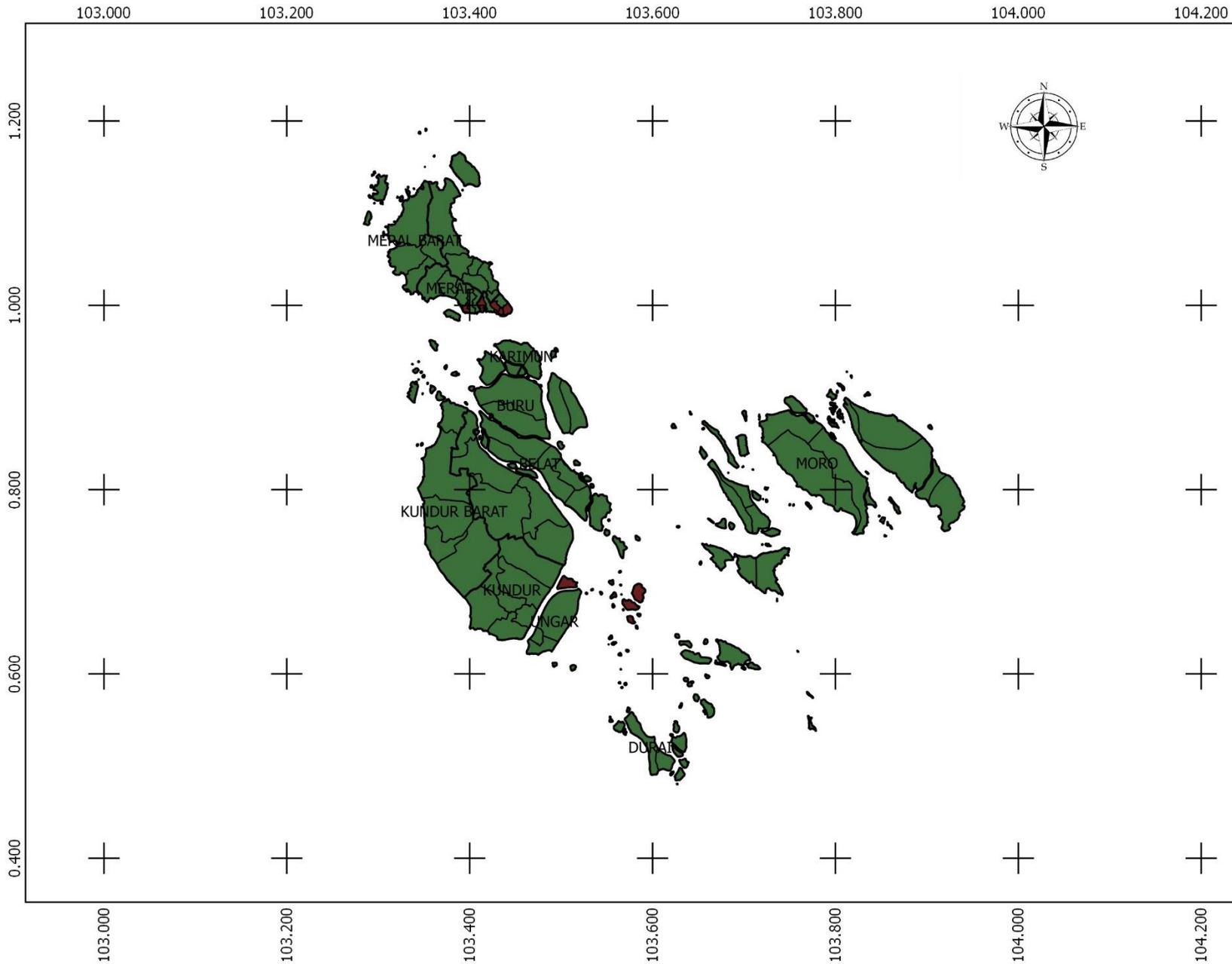
Selain itu, kebijakan mengenai sarana dan prasarana ekonomi penyedia pangan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

- (i) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - a. Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan
 - c. Pembangunan pasar
 - d. Pemantauan distribusi harga dan stok bahan kebutuhan pokok dan lainnya
 - e. Peningkatan pelayanan dan informasi dalam rangka program tol laut
 - f. Studi kelayakan pengembangan pasar modern
- (ii) Pembinaan pedagang kaki limadan asongan
 - a. Temu bisnis dengan pelaku usaha
- (iii) Pengembangan industri kecil dan menengah
 - a. Fasilitasi sertifikasi produk daerah
 - b. Penyediaan pengembangan kemasan usaha kecil menengah
 - c. Fasilitasi peningkatan peran dekranasda
- (iv) Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
 - a. Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah
 - b. Monitoring evaluasi dan pelaporan
 - c. Perluasan KUR
 - d. Fasilitasi pendamping dana bergulir
 - e. Fasilitasi peningkatan kemampuan UMKM dalam kelayakan usaha



- (v) Pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah
 - a. Pemutakhiran data dan informasi
 - b. Pengembangan produk unggul daerah melalui pendekatan OVOP
- (vi) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
 - a. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
 - b. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi
 - c. Pemantauan pengelolaannya pemerintah bagi koperasi dan UMKM

**PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**



**PETA LUAS LAHAN PERTANIAN FSVA
TAHUN 2023**

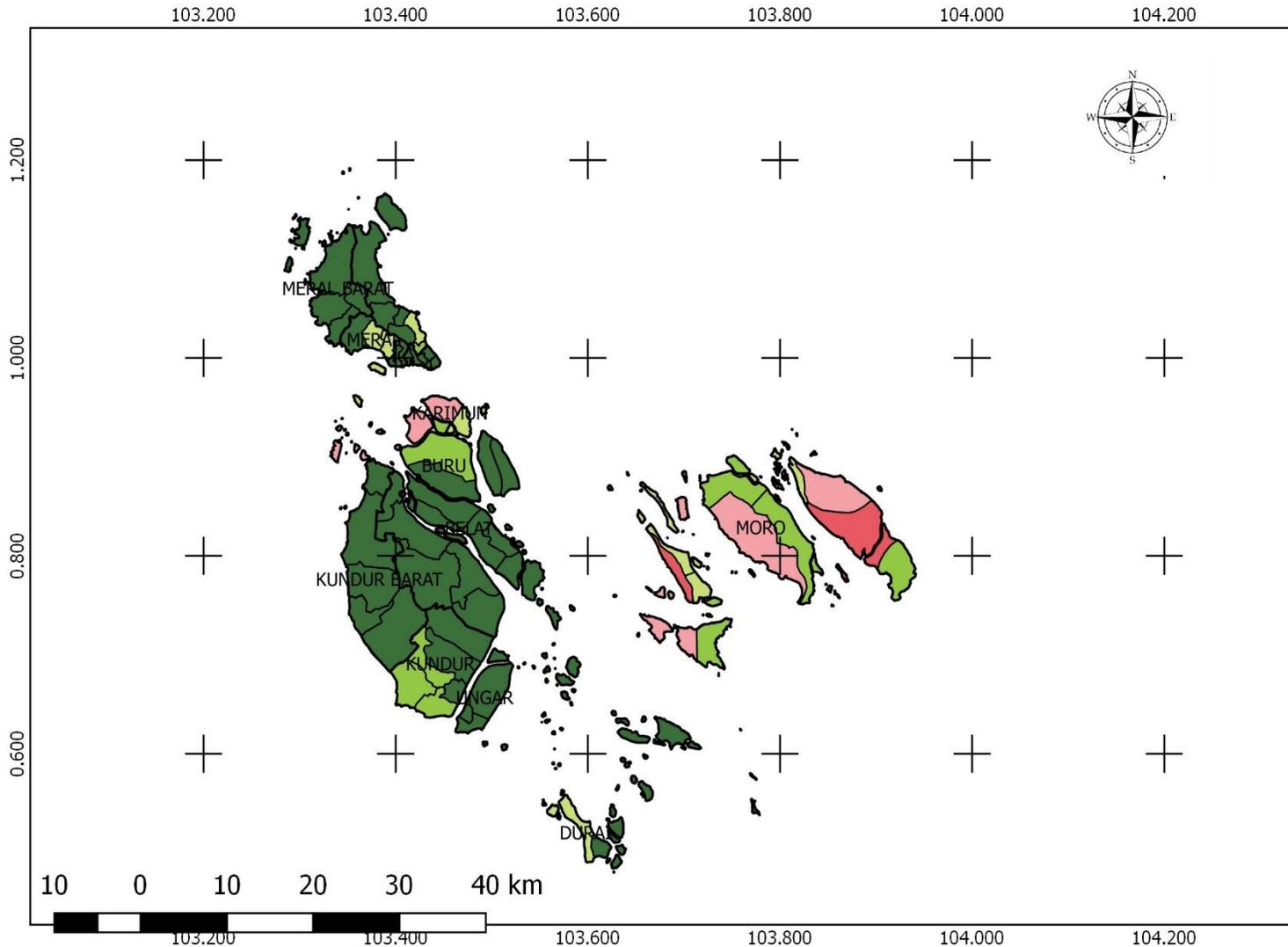


Legend

- Keterangan
- Desa Prioritas 1
- Desa Prioritas 2
- Desa Prioritas 3
- Desa Prioritas 4
- Desa Prioritas 5
- Desa Prioritas 6

- SUMBER DATA :**
1. Badan Pangan Nasional / National Food Security (NFA)
 2. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kab. Karimun
 3. Dinas Kesehatan Kab. Karimun
 4. Dinas Sosial Kab. Karimun
 5. Dinas Perhubungan Kab. Karimun
 6. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kab. Karimun
 7. Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Karimun
 8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karimun
 9. BPS Kab. Karimun

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023



PETA SARANA PENYEDIA PANGAN FSVA TAHUN 2023

LEGEND

Keterangan

- Desa Prioritas 1
- Desa Prioritas 2
- Desa Prioritas 3
- Desa Prioritas 4
- Desa Prioritas 5
- Desa Prioritas 6

SUMBER DATA :

1. Badan Pangan Nasional/ National Food Security (NFA)
2. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kab. Karimun
3. Dinas Kesehatan Kab. Karimun
4. Dinas Sosial. Kab. Karimun
5. Dinas Perhubungan Kab. Karimun
6. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kab. Karimun
7. Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Karimun
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karimun
9. BPS Kab. Karimun

BAB 3

AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) Akses ekonomi: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) Akses fisik: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) Akses sosial: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Karimun baik yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Angka kemiskinan mengalami penurunan

pada priode 2018 – 2019, dan meningkat kembali pada priode 2020 - 2022, dan pada tahun 2022 berada pada posisi 6,87%.

Tabel 3.1. Tabel Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karimun Tahun 2018 – 2022

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kemiskinan	6,90	6,61	6,83	6,85	6,87

Sumber: BPS Kabupaten Karimun

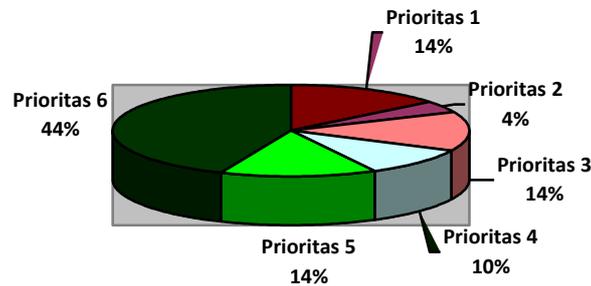
Pada tingkat desa/kelurahan berdasarkan data dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun, melalui data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) rasio rumah tangga dengan dengan tingkat kesejahteraan terendah terdapat 10 (sepuluh) desa/kelurahan yang masuk prioritas 1, 3 (tiga) desa/kelurahan yang masuk prioritas 1, dan 10 (sepuluh) desa/kelurahan yang masuk prioritas 3.

Hal ini jauh berbeda bila dibandingkan dengan hasil FSVA tahun 2022, dimana tidak terdapat desa/kelurahan yang masuk prioritas 1 dan prioritas 2. Sementara hanya 1 desa/kelurahan atau 1,41% masuk Prioritas 3.

Untuk lebih jelas, desa/kelurahan yang masuk pada prioritas 1 – 3 dapat dilihat pada Tabel. 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Tabel Sebaran rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range Rasio Tingkat Kesejahteraan Terendah	Jumlah Desa	Persentase
Prioritas 1	> 0,1609	10	14.08
Prioritas 2	0,1327 - 0,1609	3	4.23
Prioritas 3	0,0826 - 0,1327	10	14.08
Prioritas 4	0,0486 - 0,0826	7	9.86
Prioritas 5	0,0218 - 0,0486	10	14.03
Prioritas 6	< 0,0218	31	43.66



Grafik 3.1. Grafik Persentase tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan prioritas

Tabel 3.3 Tabel desa prioritas 1 – 3 indikator rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
		Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3
1	MORO	Desa Keban	Desa Pauh	
		Desa Pulau Moro		
		Desa Sugi		
		Desa Niur Permai		
		Desa Buluh Patah		
		Desa Jang		
2	DURAI		Desa Semembang	Desa Tanjung Kilang
3	BELAT	Desa Degong	Desa Sebele	Desa Tebias
		Desa Lebuh		
		Desa Sungai Asam		
		Desa Penarah		
4	UNGAR			Desa Sungai Buluh
				Desa Ngal
				Desa Batu Limau

5	BURU			Kel. Lubuk Puding
				Kel. Tanjung Batu Kecil
6	KARIMUN			Desa Tulang
				Desa Selat Mendaun
7	KUNDUR BARAT			Desa Sawang Selatan

3.2 AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan infrastruktur dan sarana pendukung pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandar udara, dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa penghasil. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil di 5

kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Jalan merupakan moda transportasi utama di Kabupaten Karimun. Akan tetapi terdapat beberapa kecamatan atau Desa di mana moda transportasi air masih menjadi bagian yang sangat penting sebagai moda transportasi utamanya. Kondisi geografis Kabupaten Karimun yang merupakan wilayah Kepulauan, membuat transportasi air merupakan moda transportasi yang dapat digunakan baik yang sudah ada secara reguler maupun bersifat sewa.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, bahwa semua desa/kelurahan memiliki akses penghubung bagi darat, laut ataupun udara untuk sepanjang tahun. Desa/kelurahan yang bisa dilalui sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, longsor, pasang, dan lain sebagainya) terdapat di Tanjung Pelanduk di Kecamatan Moro; Desa Sanglar Kecamatan Durai; dan Desa Sungai Asam di Kecamatan Belat.

Dibandingkan pada saat penyusunan FSVA tahun 2022, dimana masih terdapat 3 desa/kelurahan yang masih berada pada prioritas 3 yaitu Desa Tanjung Pelanduk di Kecamatan Moro; Desa Sanglar Kecamatan Durai; dan Desa Sungai Asam di Kecamatan Belat. Ini membuktikan beberapa program yang berhubungan dengan akses masyarakat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang ditentukan.

3.3 Strategi Peningkatan Akses Pangan

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk menanggulangi kemiskinan Kabupaten Karimun tahun 2018 - 2022 diantaranya:

- (i) Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
 - a. Pelatihan dan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
 - c. Pembinaan dan pemberdayaan sosial untuk KUBE berkembang
 - d. Pendataan (verifikasi dan validasi) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - e. Pemberian santunan dan bantuan pada PMKS
 - f. Pendampingan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan program Keluarga Harapan (PKH)
- (ii) Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan saran dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana panti sosial
 - c. Pendamping program beras miskin (Raskin) dan beras sejahtera (Rastra)
- (iii) Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
 - a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
 - b. Pendidikan dan pelatihan bagi pekerja sosial, masyarakat dan karang taruna

Sedangkan strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk mengatasi permasalahan akses penghubung di Kabupaten Karimun tahun 2018 - 2022 diantaranya:

- (i) Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
 - a. Penyusunan kebijakan, norma standar, dan prosedur bidang perhubungan

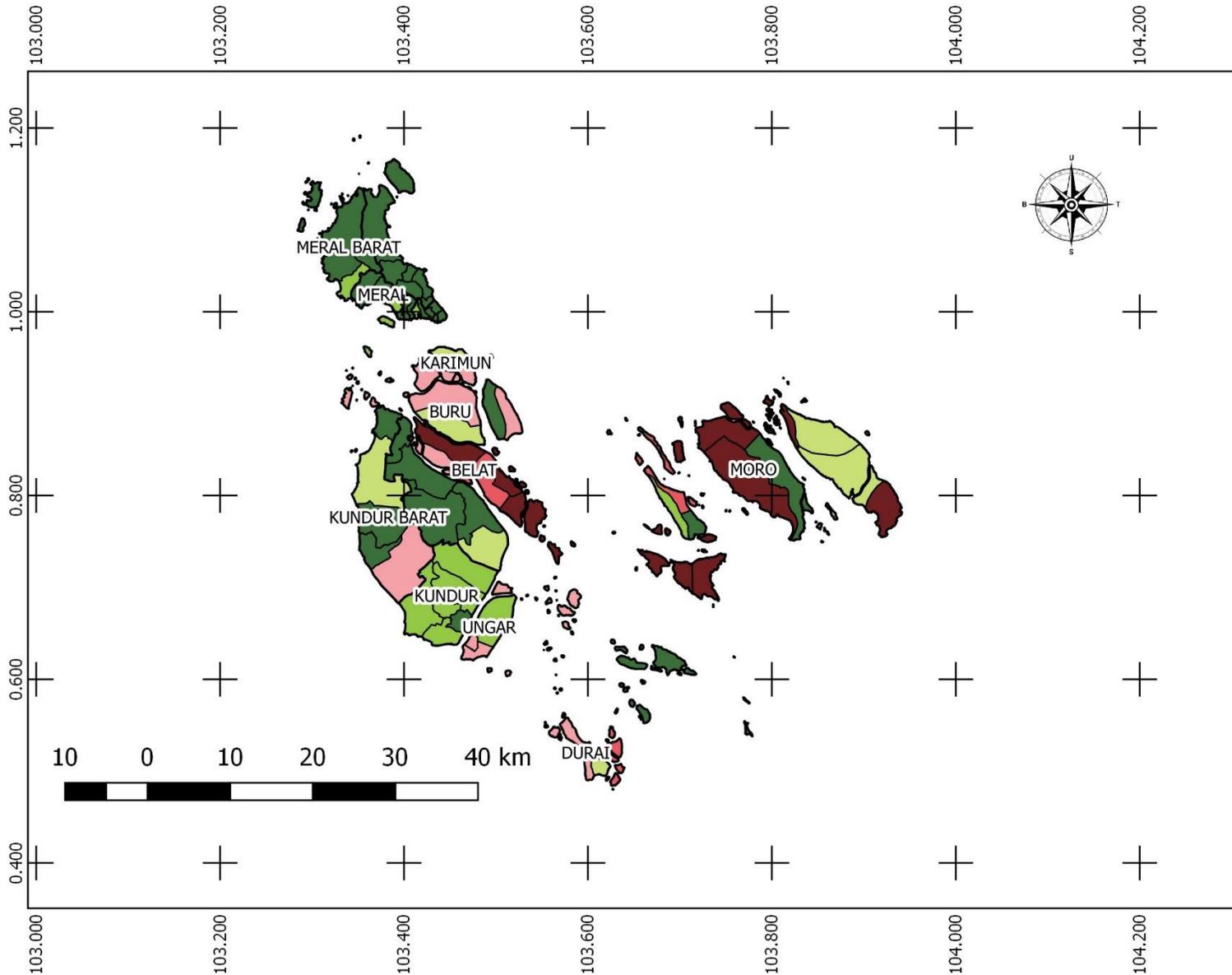
- b. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan darat
- c. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan laut
- d. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan
- (ii) Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
 - a. Pembangunan dermaga / pelabuhan
- (iii) Pengadaan sarana dan prasarana perhubungan transportasi kepulauan antar desa / pulau – pulau kecil di daerah tertinggal
 - a. Pengadaan moda angkutan barang dan penumpang
- (iv) Peningkatan pelayanan angkutan
 - a. Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
 - b. Pemberian penghargaan kepada pelopor keselamatan lalu lintas
 - c. Pengawasan aktifitas bongkar muat di pelabuhan
 - d. Pelayanan jasa angkutan laut
 - e. Peningkatan koordinasi forum lalu lintas
 - f. Pelayanan transportasi darat



NATIONAL
FOOD
AGENCY



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023



PETA PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH FSVa TAHUN 2023



Keterangan

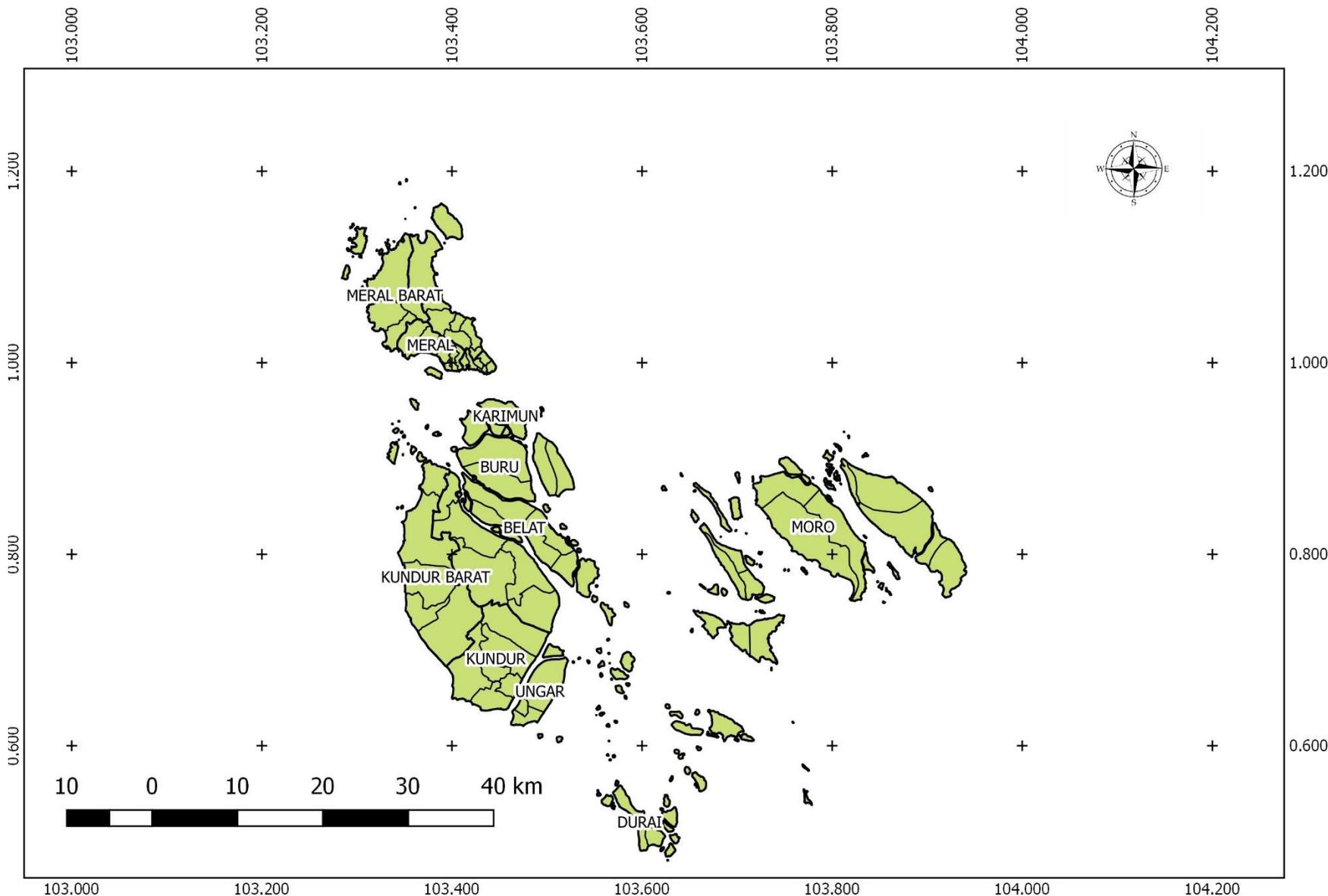
-  Desa Prioritas 1
-  Desa Prioritas 2
-  Desa Prioritas 3
-  Desa Prioritas 4
-  Desa Prioritas 5
-  Desa Prioritas 6

SUMBER DATA :

1. Badan Pangan Nasional / National Food Security (NFA)
2. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kab. Karimun
3. Dinas Kesehatan Kab. Karimun
4. Dinas Sosial Kab. Karimun
5. Dinas Perhubungan Kab. Karimun
6. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kab. Karimun
7. Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Karimun
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karimun
9. BPS Kab. Karimun

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

PETA TRANSPORTASI
FSVA TAHUN 2023



Legend

- Keterangan
- Desa Prioritas 1
 - Desa Prioritas 2
 - Desa Prioritas 3
 - Desa Prioritas 4
 - Desa Prioritas 5
 - Desa Prioritas 6
 -

- Sumber Data :
1. Badan Pangan Nasional / National Food Security (NFA)
 2. Badan Perencanaan penelitian dan Pengembangan Kab. Karimun
 3. Dinas Kesehatan Kab. Karimun
 4. Dinas Sosial Kab. Karimun
 5. Dinas Perhubungan Kab. Karimun
 6. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM
 7. Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Karimun
 8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karimun
 9. BPS Kab. Karimun

BAB 4

PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu.

Dalam penyusunan FSVA Kabupaten Karimun, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

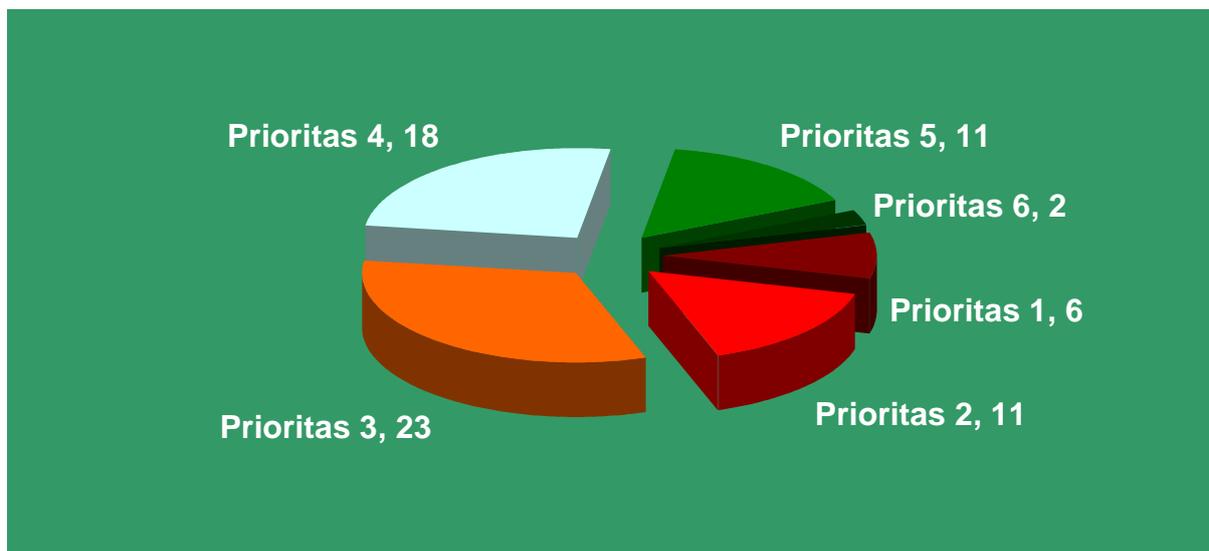
4.1 RUMAH TANGGA TANPA AKSES TERHADAP AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah seluruh rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah

dimasak¹. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Tabel 4.1 Tabel sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas

No.	Prioritas	Rasio Tanpa Akses Air Bersih	Jumlah Desa	Persentase (%)
1	Prioritas 1	> 0,1501	6	8.45
2	Prioritas 2	0,0421 - 0,1501	11	15.49
3	Prioritas 3	0,0120 - 0,0421	23	32.39
4	Prioritas 4	0,0037 - 0,0120	18	25.35
5	Prioritas 5	0,0000 - 0,0037	11	15.49
6	Prioritas 6	< 0,0000	2	2.82



¹ Permenkes 416 Tahun 1990

Tabel 4.2 Tabel desa prioritas 1 – 3 indikator rasio rumah tangga tanpa akses air bersih

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
		Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3
1	MORO	Desa Rawa Jaya	Desa Pulau Moro Desa Tanjung Pelanduk	Desa Sugie Desa Pauh Desa Keban Desa Buluh Patah
2	DURAI		Desa Semembang Desa Sanglar Desa Tanjung Kilang	Desa Telaga Tujuh
3	KUNDUR			Desa Sungai Ungar
4	KUNDUR UTARA	Desa Teluk Radang	Desa Prayun Desa Sungai Ungar Utara	Kel. Tg. Berlian Kota Desa Tg. Berlian Barat
5	KUNDUR BARAT		Desa Kundur Desa Sawang Selatan	Kel. Sawang Desa Sawang Laut
6	UNGAR	Desa Ngai Desa Batu Limau Desa Sungai Buluh	Kel. Alai	
7	BELAT			Desa Degong Desa Sungai Asam Desa Tebias Desa Lebu
8	KARIMUN			Kel. Sungai Lakam Barat
9	BURU	Kel. Buru	Kel. Lubuk Puding	Desa Tg. Batu Kecil Desa Tg. Hutan

10	MERAL			Kel. Meral Kota Kel. Sungai Pasir Kel. Baran Timur Kel. Baran Barat
11	MERAL BARAT			Desa Pangke Barat

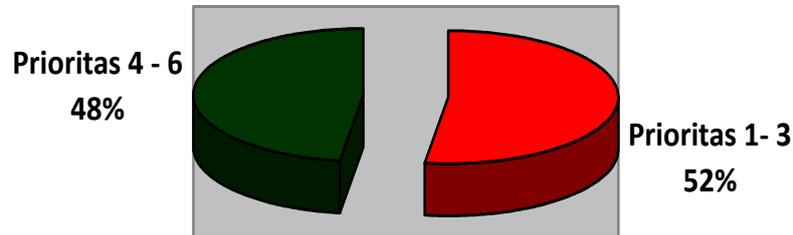
4.2 RASIO TENAGA KESEHATAN

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Tabel 4.3. Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas

No.	Prioritas	Rasio Tenaga Kesehatan	Jumlah Desa	Persentase
1	Prioritas 1	> 12,169	11	15.49
2	Prioritas 2	8,843 – 12,169	9	12.68
3	Prioritas 3	4,044 – 8,843	17	23.94
4	Prioritas 4	1,160 – 4,044	12	16.90
5	Prioritas 5	0,210 – 1,160	11	14.08
6	Prioritas 6	< 0,210	11	15.49



Grafik 4.1. Persentase Rasio prioritas 1-3 dengan prioritas 4-6 untuk tenaga kesehatan

Tabel 4.2 Tabel desa prioritas 1 – 3 indikator rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
		Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3
1	MORO	Desa Tanjung Pelanduk Desa Rawa Jaya Desa Sugie Desa Buluh Patah	Desa Keban	Desa Jang Desa Pulau Moro Desa Pauh
2	DURAI	Desa Sanglar		Desa Semembang Desa Tanjung Kilang
3	KUNDUR		Desa Sungai Ungar Kel. Gading Sari	Desa Lubuk Kel. Tanjung Batu Barat
4	KUNDUR UTARA	Desa Tg. Berlian Barat	Desa Teluk Radang Desa Sungai Ungar Utara Desa Prayun	
5	KUNDUR BARAT	Desa Sawang Selatan Desa Kundur		Kel. Sawang
6	UNGAR			Desa Ngal
7	BELAT	Desa Sungai Asam	Desa Tebias Desa Tebias	Desa Lebu Desa Degong Desa Penarah
8	KARIMUN			Desa Tulang Ke. Tg. Balai Kota

9	BURU		Kel. Buru Desa Tg. Batu Kecil
10	MERAL		Kel. Sungai Pasir
11	TEBING	Desa Pongkar	Kel. Pamak
12	MERAL BARAT	Kel. Pasir Panjang	Desa Pangke

4.3 DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai sangat berkontribusi terhadap keberlangsungan hidup manusia. Akses air bersih dan sanitasi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi bagi masyarakat. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan merupakan salah satu upaya dalam pencegahan penyakit termasuk upaya dalam penurunan prevalensi stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia dibawah lima tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan.

Kurangnya akses terhadap sarana sanitasi secara tidak langsung dapat berdampak pada kesehatan manusia. Kondisi sanitasi yang buruk dapat menjadi pemicu pencemaran air dan penyebaran wabah penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit kulit hingga keracunan. Efek jangka panjang dari buruknya sanitasi juga secara tidak langsung dapat menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi. Jika penyakit akibat buruknya akses air bersih dan sanitasi terus diderita oleh anak pada 1.000 hari pertama kehidupannya, maka anak tersebut dapat beresiko menderita stunting karena ketidakmampuan menyerap gizi dengan baik. Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan disamping beresiko menghambat pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, juga menghambat perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak dimasa depan.

Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau *stunting* (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau *wasting* (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Tabel 4.5. Tabel Jumlah Balita Stunting Tahun 2020 - 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH BALITA		
		2020	2021	2022
1	Moro	202	185	163
2	Durai	49	47	70
3	Kundur	42	30	37
4	Kundur Utara	94	51	47
5	Kundur Barat	113	77	103
6	Ungar	26	20	10
7	Belat	32	50	12
8	Karimun	141	118	300
9	Buru	64	52	38
10	Meral	124	105	146
11	Tebing	104	147	147
12	Meral Barat	77	63	57
	Total	1068	945	1130

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun

Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Karimun pada bulan Desember tahun 2022 sebanyak 28 balita. Jumlah penderita gizi buruk yang tinggi ditemukan di Kecamatan Meral (8 balita) dan Kecamatan Tebing (7 balita), Kecamatan Kundur

Barat (3 balita), Kecamatan Meral Barat (3 balita), Kecamatan Kundur Utara (2 balita), Kecamatan Belat (2 balita), Kecamatan Karimun (2 balita) dan Kecamatan Kundur (1 balita).

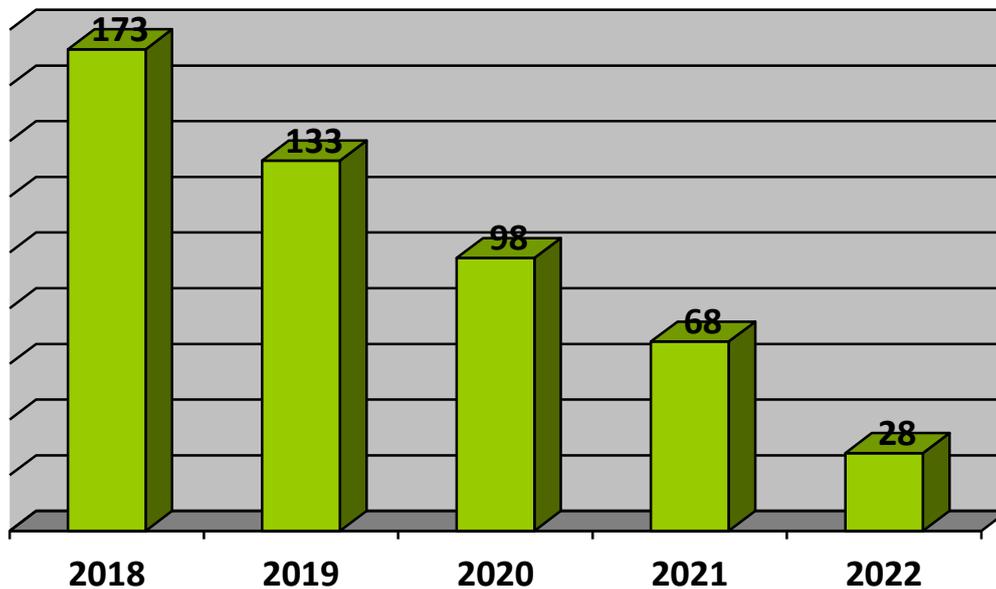
Tabel 4.6. Tabel Penderita Gizi Buruk 2018-2022

No.	Kecamatan	Penderita Gizi Buruk				
		2018	2019	2020	2021*)	2022**)
1	Moro	15	18	5	7	0
2	Durai	8	11	1	1	0
3	Kundur	32	14	4	3	1
4	Kundur Utara	13	7	0	2	2
5	Kundur Barat	5	9	29	12	3
6	Ungar	15	4	4	0	0
7	Belat	8	11	1	21	2
8	Karimun	26	17	1	4	2
9	Buru	9	1	9	0	0
10	Meral	20	19	10	3	8
11	Tebing	8	14	16	3	7
12	Meral Barat	14	8	18	12	3
	Total	173	133	98	68	28

Catatan : *) data Januari tahun 2022

***) data bulan Desember 2022

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun



Grafik 4.2. Grafik Penderita Gizi Buruk (jiwa)

Penderita gizi buruk dari tahun 2018 sampai 2022 terus mengalami penurunan, dengan demikian dapat dipandang bahwa upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang selama ini dijalankan di Kabupaten Karimun berada di jalur yang benar. Oleh karena itu beberapa program peningkatan kesehatan masyarakat tersebut perlu dipertahankan.

Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kabupaten Karimun pada tahun 2022 mencapai 42 jiwa. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan pada tahun 2022 di Kabupaten Karimun terdapat 2 jiwa.

Angka kematian balita tertinggi terdapat di Kecamatan Meral (6 jiwa) dan Kecamatan Kundur Barat (6 jiwa), sedangkan angka kematian balita terendah terdapat di Kecamatan Kundur Utara (0 jiwa). Sedangkan kematian ibu saat melahirkan terdapat di Kecamatan Kundur dan Kecamatan Meral dimana masing-masing kecamatan terdapat 1 orang ibu meninggal saat melahirkan. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN BALITA	JUMLAH KEMATIAN IBU SAAT MELAHIRKAN
1	Moro	1	0
2	Durai	1	0
3	Kundur	5	1
4	Kundur Utara	0	0
5	Kundur Barat	6	0
6	Ungar	2	0
7	Belat	4	0
8	Karimun	3	0
9	Buru	3	0
10	Meral	6	1
11	Tebing	3	0
12	Meral Barat	8	0
	Total	42	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun

4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan

Masalah gizi kronis (stunting) masih tetap tinggi di Kabupaten Karimun, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka

pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi.

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:
 - a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut "jendela peluang (*window of opportunity*)" karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.
 - b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.

- c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
 - d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.
2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan). Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.
- a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):
 - Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (Sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
 - Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
 - Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan (MP-ASI); mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.

- Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bias dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
 - Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Departemen Kesehatan.
 - Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian tablet besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-59, serta ibu nifas; pemberian obat cacing pada anak balita.
- b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)
3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi di bidang gizi / kesehatan merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-

biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Berbicara masalah kualitas hidup manusia tidak terlepas dari umur yang panjang dan hidup sehat, maka tak heran jika kesehatan sering diistilahkan sebagai inventasi bangsa, yang berarti bahwa jika anak-anak sebagai penerus terjamin kesehatannya maka masa depan suatu bangsa akan baik. Berbicara masalah kesehatan anak tidak terlepas dari status gizi anak itu sendiri yang dibagi kedalam beberapa kategori yaitu, Gizi Buruk, Kekurangan Gizi, gizi baik dan gizi lebih, sedangkan untuk permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dengan rentang waktu yang cukup lama disebut stunting, umumnya stunting ini disebabkan oleh asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten Karimun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) adalah Meningkatkan Kualitas hidup Manusia melalui strategi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat ditetapkan sasaran meningkatnya status kesehatan masyarakat yang dapat diukur melalui Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Kekurangan gizi (underweight), Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR).

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena kecelakaan, bencana, cedera, atau bunuh diri. Angka Kematian Ibu (AKI) dinyatakan dalam 100.000 kelahiran hidup dalam periode tertentu.

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sudah cukup baik, namun pemahaman pada masyarakat tentang tanda bahaya pada saat kehamilan dan nifas masih kurang sehingga terjadi keterlambatan penanganan dan pertolongan.
- b. Belum tercapainya kunjungan K4 ibu hamil sehingga komplikasi yang terjadi pada trimester ketiga kehamilan tidak terdeteksi secara dini, sehingga antisipasi penanganan oleh petugas kesehatan tidak maksimal

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera, atau bunuh diri.

Kematian bayi rata-rata disebabkan oleh asfiksia dan BBLR (berat badan lahir rendah), disertai penyebab lainnya seperti diare, icterus, kelainan saluran cerna, pneumonia dan sepsis. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan kematian bayi adalah meningkatkan kualitas pelayanan pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir serta meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan (dokter, bidan dan tenaga kesehatan lain) dalam memberikan pelayanan.

3. Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada balita

Underweight merupakan status gizi sangat kurang dan kurang berdasarkan berat badan per umur (BB/U) pada balita. Underweight membawa dampak negative terhadap pertumbuhan fisik maupun mental anak.

4. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi baru lahir yang berat badannya saat lahir kurang dari 2500 gram. BBLR tidak hanya terjadi pada bayi premature, tapi

juga pada bayi cukup bulan yang mengalami hambatan pertumbuhan selama kehamilan.

BBLR biasanya disebabkan oleh status gizi ibu hamil kurang baik selama kehamilan atau ibu hamil mengalami Kurang Energi Kronik (KEK) sehingga asupan gizi pada bayi semasa dalam kandungan kurang sehingga menyebabkan perkembangan janin tidak maksimal. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan cakupan BBLR adalah pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK, pemberian TTD (Tablet Tambah Darah) pada ibu hamil serta pemberian KIE terkait kebutuhan gizi pada ibu hamil.

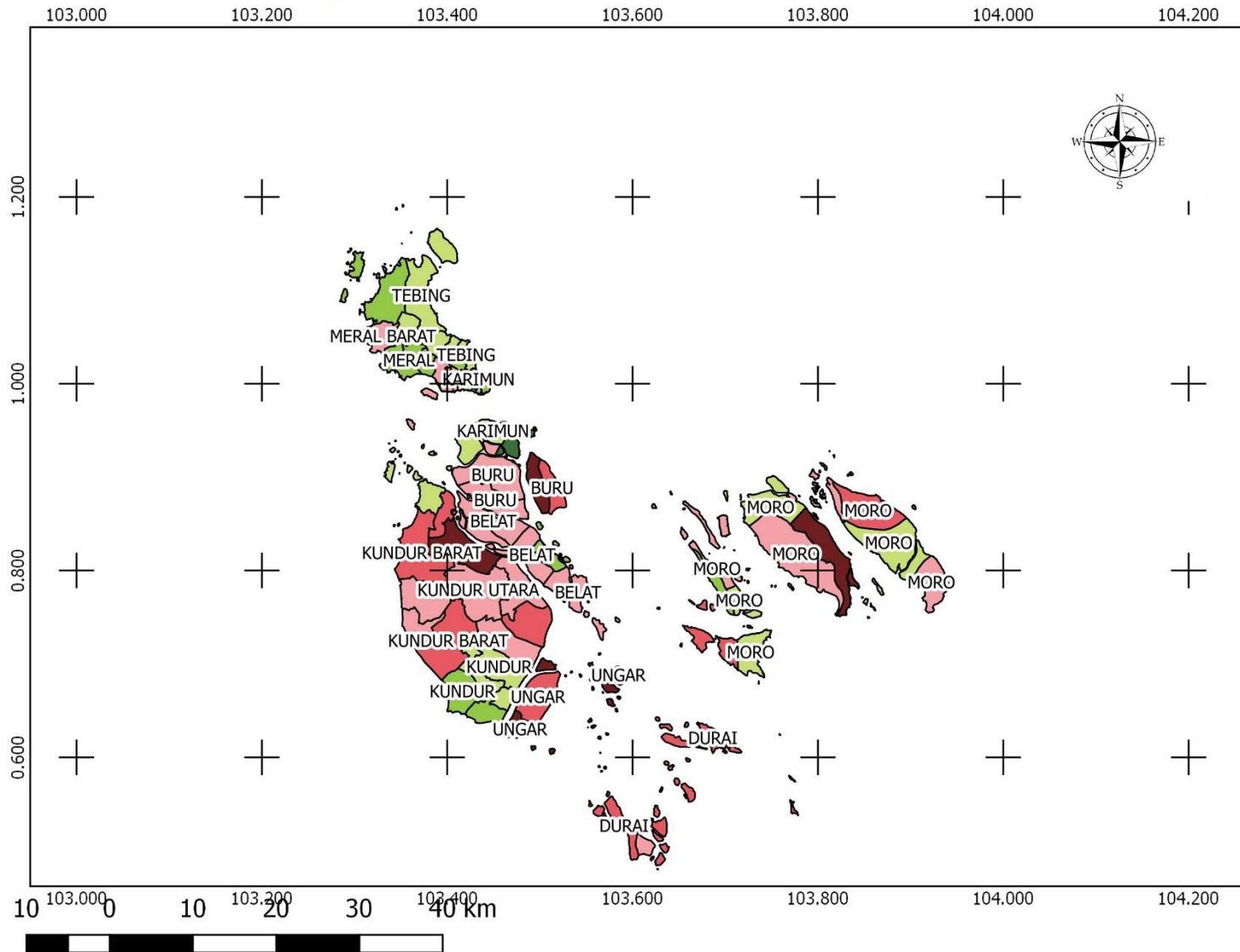
Program dan kegiatan yang mendukung peningkatan upaya perbaikan status gizi masyarakat di Kabuapten Karimun adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, bayi dan balita, upaya perbaikan gizi masyarakat, upaya kesehatan lingkungan (STBM, pembinaan TTU dan TPM), serta pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - a. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, meliputi pelatihan untuk tenaga kesehatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Selain beberapa hal diatas, strategi untuk memperbaiki status gizi yang berfokus pada peningkatan akses sanitasi dan penyehatan lingkungan dapat dilaksanakan antara lain:

1. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) : merupakan kegiatan yang berfokus pada peningkatan akses sanitasi masyarakat untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
2. Pengawasan dan pemeriksaan kualitas air bersih dan air minum.
3. Pengawasan dan Pembinaan Tempat - Tempat Umum dan Tempat Pengelolaan Makanan.

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN KARIMUN PEROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023



PETA RUMAH TANGGA TANPA AKSES AIR BERSIH FSVA TAHUN 2023



LEGENDA

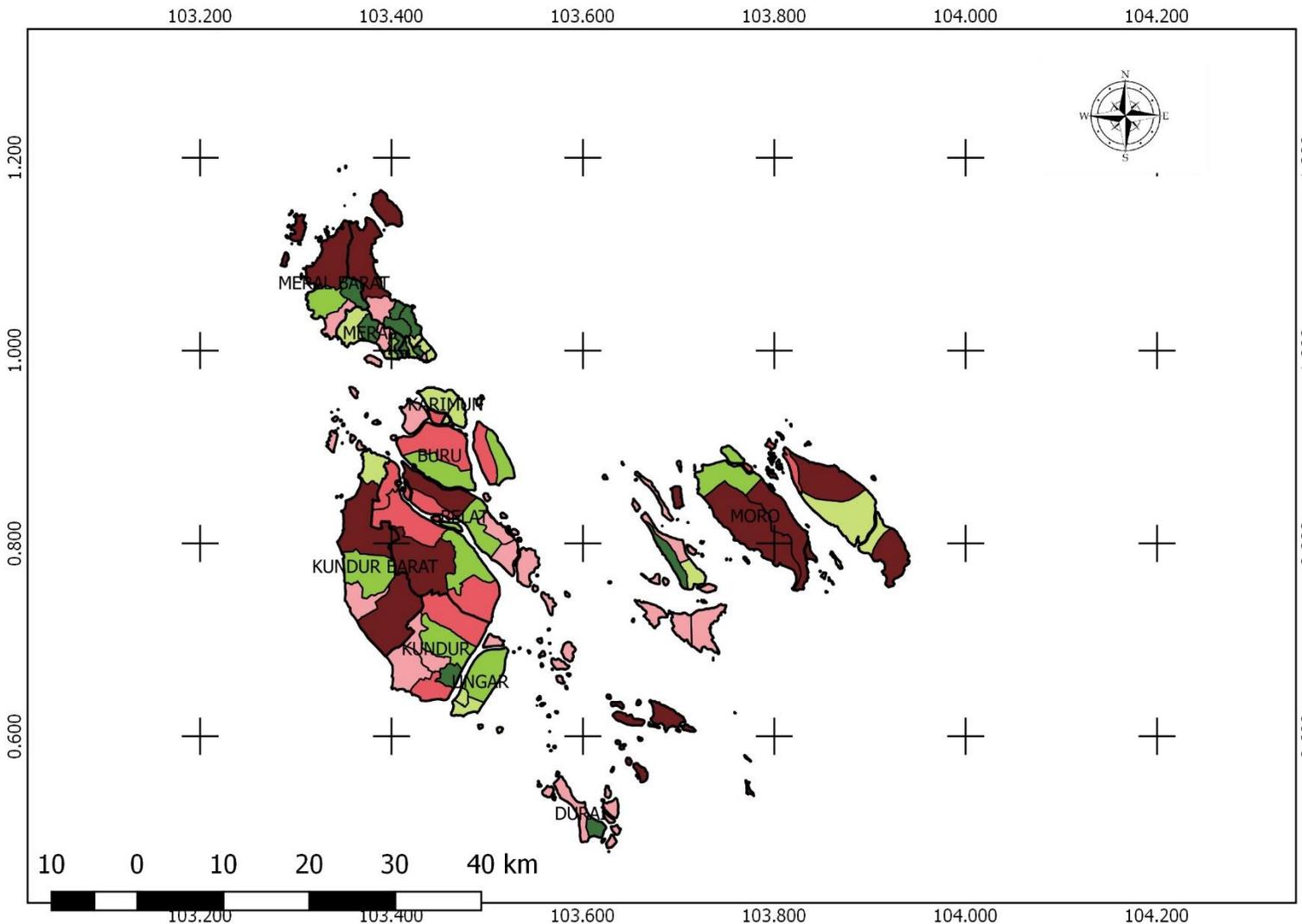
Keterangan

- Desa Prioritas 1
- Desa Prioritas 2
- Desa Prioritas 3
- Desa Prioritas 4
- Desa Prioritas 5
- Desa Prioritas 6

SUMBER DATA :

1. Badan Pangan Nasional / NFA National Food Security
2. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kab. Karimun
3. Dinas Kesehatan Kab. Karimun
4. Dinas Sosial Kab. Karimun
5. Dinas Perhubungan Kab. Karimun
6. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kab. Karimun
7. Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Karimun
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karimun
9. BPS Kab. Karimun

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023



PETA TENAGA KESEHATAN
FSVA TAHUN 2023



LEGEND

Keterangan

- Desa Prioritas 1
- Desa Prioritas 2
- Desa Prioritas 3
- Desa Prioritas 4
- Desa Prioritas 5
- Desa Prioritas 6

SUMBER DATA :

1. Badan Pangan Nasional / National Food Security(NFA)
2. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kab. Karimun
3. Dinas Kesehatan Kab. Karimun
4. Dinas Sosial Kab. Karimun
5. Dinas Perhubungan Kab. Karimun
6. DInas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Esdm Kab. Karimun
7. Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Karimun
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karimun
9. BPS. Kab. Karimun

BAB 5

KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab 2, 3 dan 4. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 6.1) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga

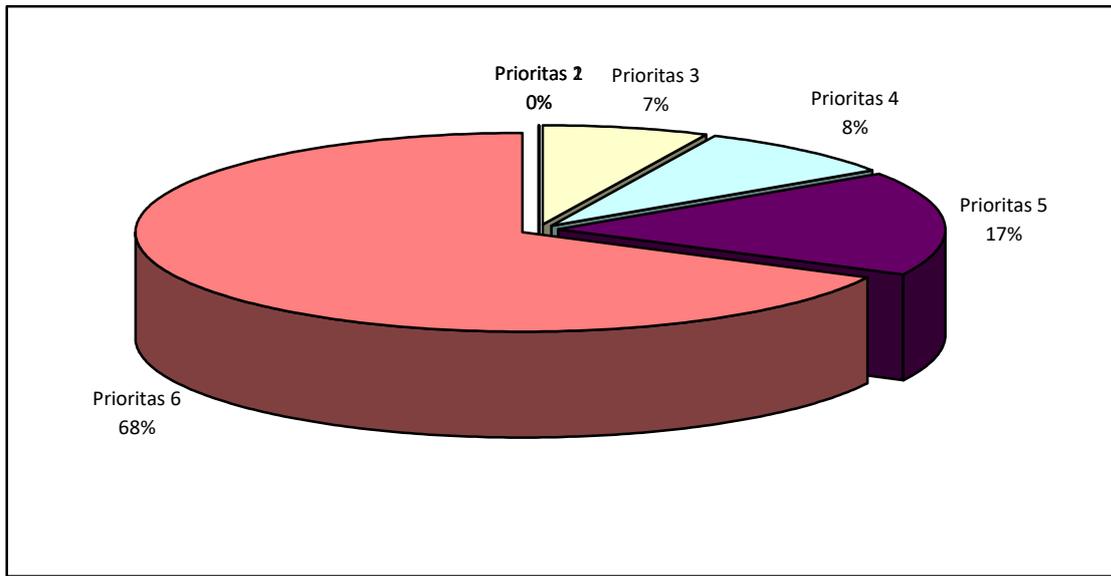
sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis komposit tersebut, dari 71 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Karimun maka didapatkan 5 desa yang masuk prioritas 1 – 3 sebagaimana ditampilkan pada table 5.1 berikut :

Tabel 5.1. Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas

Prioritas	Jumlah Desa	Persentase (%)
Prioritas 1	0	0.00
Prioritas 2	0	0.00
Prioritas 3	5	7.04
Prioritas 4	6	8.45
Prioritas 5	12	16.90
Prioritas 6	48	67.61

Desa rentan terhadap kerawanan pangan (prioritas 1 – 3) semuanya berada di Prioritas 3 dan Semuanya berada di Kecamatan Moro yaitu terdapat di Desa Sugie, Desa Keban, Desa Pulau Moro, Desa Tanjung Pelanduk dan Desa Buluh Patah.



Gambar 5.1 Sebaran prioritas komposit per kecamatan

5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 1 dan 2 secara umum disebabkan oleh: (1) kurangnya jumlah dan tidak meratanya tenaga kesehatan, (2) kurangnya akses terhadap air bersih, (3) minimnya sarana penyedia jasa pangan.

Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 secara umum disebabkan oleh: (1) kurangnya jumlah dan tidak meratanya tenaga kesehatan, (2), dan kurangnya akses terhadap air bersih.

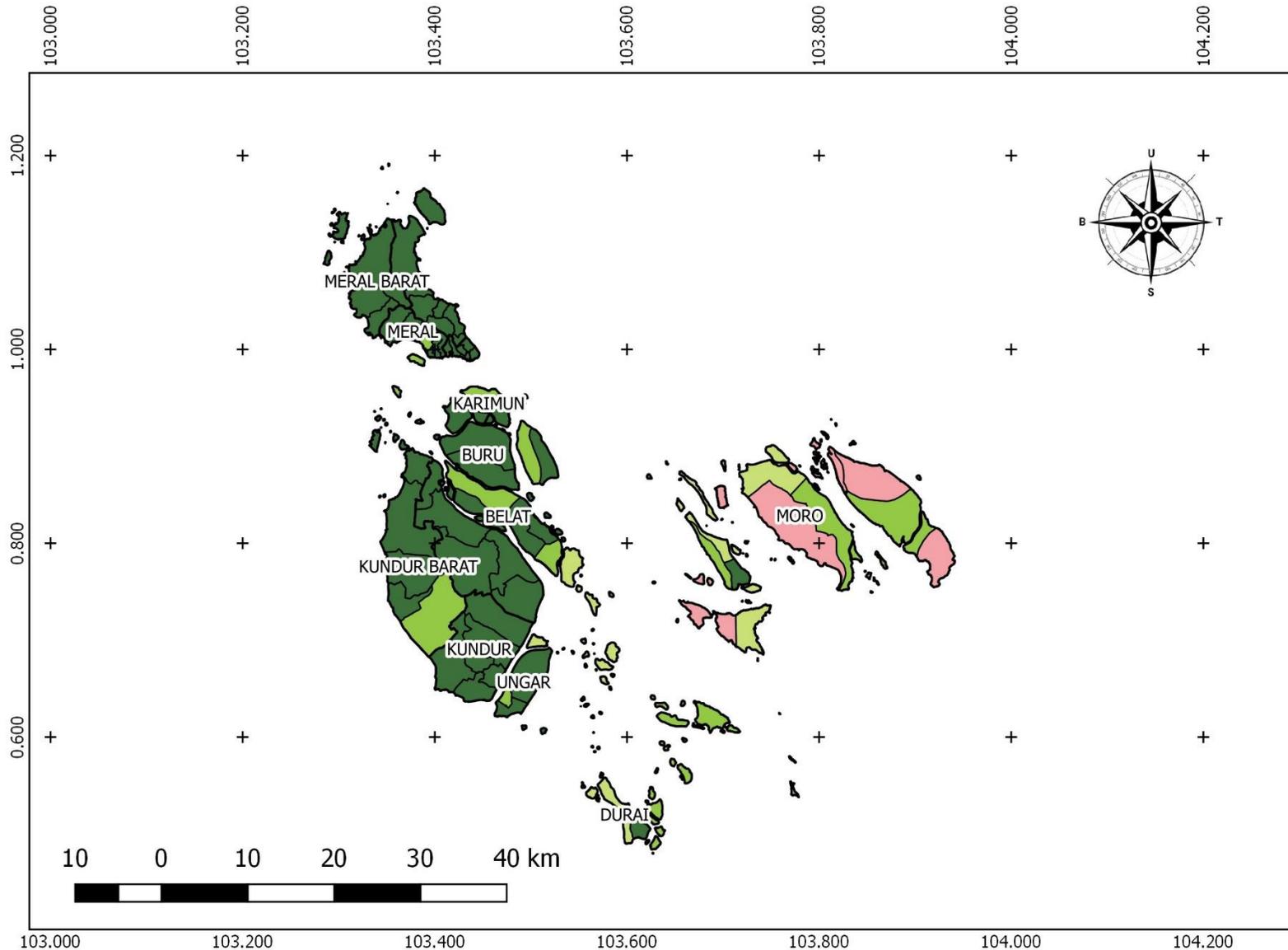


**NATIONAL
FOOD
AGENCY**



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

PETA KOMPOSIT TAHUN 2023
KABUPATEN KARIMUN



LEGENDA

Keterangan

- Desa Prioritas 1
- Desa Prioritas 2
- Desa Prioritas 3
- Desa Prioritas 4
- Desa Prioritas 5
- Desa Prioritas 6

- Sumber Data :
1. Badan Pangan Nasional / National Food Security (NFA)
 2. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kab. Karimun
 3. Dinas Kesehatan Kab. Karimun
 4. Dinas Sosial Ka. Karimun
 5. Dinas Perhubungan Kab. Karimun
 6. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kab. Karimun
 7. Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Karimun
 8. Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kab. Karimun
 9. BPS Kab. Karimun

BAB 6

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan setiap wilayah sampai ke tingkat Desa, dan dengan demikian diharapkan akan membantu dalam pengambilan kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang relevan di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil analisis, fokus lokasi penanganan kerentanan pangan yang diprioritaskan yaitu pada:

- a. Desa-desa prioritas 3 yang semuanya berada di Kecamatan Moro.
- b. Desa-desa yang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten atau di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain atau negara lain.
- c. Desa-desa yang merupakan wilayah Kepulauan yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan.
- d. Desa-desa pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) nya masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 6.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan



Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:

- Peningkatan jumlah lahan pertanian baru, peningkatan penerapan teknologi pertanian, dan peningkatan produksi pertanian.
- Peningkatan penyediaan pangan di daerah dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.



- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan air baku, fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- e. Penyediaan dan pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah desa.

